



ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi¹

Universitas Nusantara PGRI Kediri

rizasofia23@gmail.com

Sova Sevilia²

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

Shovasevilia17@gmail.com

Kotimah³

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

kotimah06@gmail.com

Abstrak

Kebijakan subsidi pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian yang berperan menjaga stabilitas harga dan melindungi kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Namun, dalam praktiknya, subsidi sering menghadapi persoalan efektivitas, ketepatan sasaran, serta keadilan distribusi. Kondisi tersebut menuntut adanya kajian yang tidak hanya menilai subsidi dari aspek teknis ekonomi, tetapi juga dari perspektif nilai dan tujuan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan subsidi pemerintah dalam perspektif ekonomi mikro Islam serta implikasinya terhadap kesejahteraan rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka, melalui penelaahan dan sintesis terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan tema subsidi, peran negara, keadilan fiskal, dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam ekonomi mikro Islam, subsidi memiliki legitimasi normatif sebagai instrumen kebijakan publik yang berorientasi pada *maslahah* dan *falah*. Subsidi dipandang efektif dalam menjaga daya beli dan stabilitas sosial apabila dirancang secara adil, tepat sasaran, dan disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Selain itu, peran negara yang proporsional serta integrasi prinsip etika Islam menjadi faktor penting dalam memastikan subsidi berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan subsidi dalam perspektif ekonomi mikro Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kerangka konseptual subsidi sebagai kebijakan publik berbasis nilai-nilai ekonomi Islam.

Kata Kunci: Subsidi Pemerintah, Ekonomi Mikro Islam, Keadilan Fiskal, Kesejahteraan Rakyat, Peran Negara.

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

Abstract

Government subsidy policy is one of the key instruments in the economy, playing a role in maintaining price stability and protecting public welfare, especially for low-income groups. However, in practice, subsidies often face issues of effectiveness, targeting accuracy, and distributive fairness. These conditions require an analysis that not only evaluates subsidies from a technical economic standpoint but also from the perspective of social values and objectives. This study aims to analyze government subsidy policy through the lens of Islamic microeconomics and its implications for people's welfare. The study employs a qualitative approach using a library research design by reviewing and synthesizing scholarly journal articles relevant to subsidies, the role of the state, fiscal justice, and welfare in Islamic economics. The findings indicate that, within Islamic microeconomics, subsidies have normative legitimacy as a public policy instrument oriented toward *maslahah* (public benefit) and *falah* (well-being/success). Subsidies are considered effective in sustaining purchasing power and social stability when they are designed fairly, accurately targeted, and supported by adequate oversight mechanisms. Furthermore, a proportional role of the state and the integration of Islamic ethical principles are crucial to ensuring that subsidies contribute to a more equitable distribution of welfare. This study concludes that subsidy policy, from the perspective of Islamic microeconomics, functions not only as a tool for economic stabilization but also as a means of realizing social justice. The contribution of this study lies in strengthening the conceptual framework of subsidies as a value-based public policy grounded in Islamic economic principles.

Keywords: Government Subsidies, Islamic Microeconomics, Fiscal Justice, People's Welfare, Role Of The State.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan subsidi pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang secara luas digunakan untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan dasar dan melindungi kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Dalam kerangka ekonomi Islam, subsidi tidak hanya dipahami sebagai kebijakan fiskal teknis, melainkan sebagai wujud tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya publik demi kemaslahatan umat. Negara diposisikan sebagai pihak yang memiliki kewajiban moral dan institusional untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta menjaga keadilan sosial melalui kebijakan ekonomi yang proporsional.¹

Peran strategis subsidi semakin mengemuka di tengah dinamika ekonomi yang ditandai oleh fluktuasi harga komoditas strategis dan meningkatnya kerentanan

¹ Damri Batubara, "Pandangan Islam Terhadap Subsidi," *At-Tijarah* 2, no. 2 (2016): 1–3.

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, subsidi sering dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga daya beli dan mencegah perluasan ketimpangan sosial. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi juga menghadapi persoalan implementasi, seperti ketidaktepatan sasaran, beban fiskal yang signifikan, serta potensi distorsi mekanisme pasar. Dalam perspektif ekonomi Islam, persoalan-persoalan tersebut tidak hanya dinilai dari aspek efisiensi ekonomi, tetapi juga dari sudut pandang keadilan distributif dan akuntabilitas pengelolaan kebijakan publik.² Oleh karena itu, kajian mengenai subsidi memerlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan analisis kebijakan dengan nilai-nilai normatif ekonomi Islam.

Literatur ekonomi Islam secara konseptual menegaskan bahwa intervensi negara dalam perekonomian, termasuk melalui kebijakan subsidi, memiliki dasar yang kuat sepanjang diarahkan untuk mengoreksi kegagalan pasar dan mencegah ketidakadilan. Dalam kerangka ekonomi mikro Islam, subsidi dipahami sebagai instrumen korektif yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, sekaligus memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.³ Dengan demikian, subsidi tidak diposisikan sebagai antitesis mekanisme pasar, melainkan sebagai sarana untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Lebih lanjut, konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan pendekatan ekonomi konvensional. Kesejahteraan tidak semata-mata diukur melalui indikator material, tetapi juga melalui tercapainya *falah* dan *maslahah*, yang mencerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar, terjaganya martabat manusia, serta terwujudnya keadilan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan subsidi dipandang sebagai bagian dari instrumen belanja negara yang berpotensi mendukung kesejahteraan sosial apabila dirancang dan dikelola secara adil, transparan, dan tepat sasaran.⁴ Namun, literatur juga menunjukkan bahwa lemahnya

² Dheddy Abdi Tamba dkk., *The Concept and Philosophy of Fiscal Policy in Modern and Islamic Historical Perspectives*, 2, no. 1 (t.t.): 5–7.

³ Ahrina Laila dkk., *Government Policies In Islamic Microeconomics Kebijakan Pemerintah Dalam Ekonomi Mikro Islam*, t.t., 12–14.

⁴ Yuli Andriansyah dan M Bekti Hendrie Anto, *Government Spending in Indonesia 2005-2013 from Islamic Economic Perspective*, 6 (2016): 45–47.

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

tata kelola dan pengawasan dapat mengurangi efektivitas subsidi dalam mencapai tujuan tersebut.

Aspek pengawasan menjadi perhatian penting dalam kajian ekonomi Islam terkait kebijakan subsidi. Konsep *al-hisbah* menegaskan peran negara dalam mengawasi aktivitas ekonomi agar terhindar dari penyimpangan dan praktik yang merugikan masyarakat. Pengawasan dipahami sebagai mekanisme etis dan institusional untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak serta dikelola sesuai dengan prinsip keadilan.⁵ Tanpa pengawasan yang memadai, subsidi berpotensi kehilangan orientasi kesejahteraannya dan menimbulkan ketimpangan baru.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai jurnal ilmiah, terlihat adanya celah penelitian yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Sebagian besar kajian mengenai subsidi masih menitikberatkan pada aspek kebijakan fiskal atau dampak makroekonomi, sementara kajian yang secara sistematis mengintegrasikan perspektif ekonomi mikro Islam dengan orientasi kesejahteraan rakyat relatif terbatas. Selain itu, hubungan konseptual antara kebijakan subsidi dan pencapaian *falah* serta *maslahah* belum banyak dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan kajian pustaka. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah tersebut melalui analisis kritis terhadap literatur yang relevan.

Sejalan dengan fokus tersebut, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang bertujuan mengkaji kebijakan subsidi pemerintah dalam perspektif ekonomi mikro Islam terhadap kesejahteraan rakyat. Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis secara konseptual kebijakan subsidi pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan landasan konseptual subsidi dalam ekonomi mikro Islam berdasarkan literatur ilmiah
2. Menganalisis peran subsidi sebagai bentuk intervensi negara dalam menjaga keseimbangan pasar dan keadilan distributif

⁵ Farah Saima dan Faisal Fauzan, "THE THEORY OF AL-MISBAH ON SUBSIDIZED GAS DISTRIBUTION: A Case Study of Banda Raya Sub-District, Banda Aceh, Indonesia," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2025): 8–10, <https://doi.org/10.22373/jurista.v9i1.252>.

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

3. Mengkaji keterkaitan antara kebijakan subsidi dan kesejahteraan rakyat dalam kerangka *falah* dan *maslahah*.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan kerangka analisis ekonomi mikro Islam dalam kajian kebijakan subsidi berbasis studi pustaka. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual bagi perumusan dan evaluasi kebijakan subsidi agar lebih berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis secara konseptual kebijakan subsidi pemerintah dalam perspektif ekonomi mikro Islam, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelaah pemikiran, konsep, serta hasil kajian akademik yang telah dipublikasikan, sehingga relevan dengan tujuan penelitian yang menitikberatkan pada analisis normatif dan teoretis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah yang membahas kebijakan subsidi, peran negara dalam ekonomi Islam, intervensi pasar, serta konsep kesejahteraan rakyat dalam kerangka *falah* dan *maslahah*. Literatur yang dijadikan sumber penelitian diseleksi secara purposif berdasarkan kesesuaian topik, kualitas akademik, serta kontribusinya dalam membangun kerangka analisis penelitian. Pemanfaatan jurnal ilmiah sebagai sumber utama dimaksudkan untuk memastikan bahwa kajian yang dilakukan bertumpu pada referensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Konseptual Subsidi dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa subsidi dalam perspektif ekonomi Islam memiliki kedudukan yang sah dan kuat secara normatif. Subsidi tidak dipahami sekadar sebagai instrumen fiskal untuk mengatur harga, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan publik. Dalam kerangka ekonomi Islam, negara dipandang memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta mencegah munculnya

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

ketimpangan sosial yang dapat mengganggu keseimbangan ekonomi.⁶ Dengan demikian, kebijakan subsidi berakar pada prinsip tanggung jawab sosial negara terhadap kesejahteraan rakyat.

Secara konseptual, subsidi dipandang sebagai kebijakan yang bersifat *mubah* dan dapat diterapkan sepanjang diarahkan untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan serta menjaga keadilan distribusi. Ketika mekanisme pasar tidak mampu menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, intervensi negara melalui subsidi dipandang sebagai langkah yang dibenarkan.⁷ Dalam perspektif ekonomi mikro Islam, subsidi berfungsi sebagai instrumen korektif untuk mengatasi kegagalan pasar dan mencegah praktik ekonomi yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, subsidi tidak dimaknai sebagai penyimpangan dari mekanisme pasar, tetapi sebagai upaya untuk menegakkan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi.

Literatur juga memperlihatkan bahwa subsidi memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal tidak semata-mata ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga diarahkan pada pencapaian tujuan sosial yang lebih luas. Subsidi diposisikan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan publik yang harus dijalankan sejalan dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.⁸ Dengan kerangka tersebut, subsidi menjadi instrumen fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar alat pengendalian ekonomi jangka pendek.

Dalam konteks ekonomi mikro Islam, intervensi negara melalui subsidi tidak dipandang bertentangan dengan prinsip pasar selama dilakukan secara proporsional dan berlandaskan kepentingan umum. Negara memiliki peran untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung sesuai dengan nilai-nilai etika

⁶ Batubara, "Pandangan Islam Terhadap Subsidi," 1–3.

⁷ Laila dkk., *Government Policies In Islamic Microeconomics Kebijakan Pemerintah Dalam Ekonomi Mikro Islam*, 12–14.

⁸ Tamba dkk., *The Concept and Philosophy of Fiscal Policy in Modern and Islamic Historical Perspectives*, 5–7.

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

Islam.⁹ Subsidi, dalam hal ini, dipahami sebagai mekanisme yang bertujuan menjaga keseimbangan tersebut dan mencegah terjadinya ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Secara keseluruhan, landasan konseptual subsidi dalam perspektif ekonomi mikro Islam menegaskan bahwa subsidi merupakan kebijakan yang relevan dan dapat dibenarkan apabila diarahkan untuk menjaga keadilan ekonomi serta melindungi kesejahteraan masyarakat. Penilaian terhadap subsidi tidak hanya didasarkan pada aspek efektivitas ekonomi, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan tujuan moral dan sosial Islam. Pemahaman konseptual ini menjadi pijakan penting bagi pembahasan subtema selanjutnya, terutama dalam mengkaji peran negara, bentuk intervensi pasar, serta implikasi kebijakan subsidi terhadap kesejahteraan rakyat dalam kerangka ekonomi Islam.

2. Peran Negara dan Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam

Kajian terhadap literatur menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran aktif dalam mengelola perekonomian, termasuk melalui intervensi pasar. Peran ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme pasar secara total, melainkan untuk memastikan bahwa aktivitas pasar berlangsung dalam batas-batas keadilan dan kemaslahatan. Negara memperoleh legitimasi untuk melakukan intervensi ketika terjadi ketidakseimbangan pasar yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Dalam kerangka ini, kebijakan fiskal dan pengaturan harga menjadi instrumen penting yang digunakan negara untuk memperbaiki ketidaksempurnaan pasar.¹⁰

Lebih lanjut, literatur menegaskan bahwa intervensi negara dalam perspektif Islam bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Ketika mekanisme pasar gagal melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan, seperti spekulasi berlebihan, penimbunan barang, atau lonjakan harga yang tidak rasional, negara dipandang perlu mengambil peran korektif. Intervensi pasar dalam konteks ini dipahami sebagai

⁹ Andriansyah dan Anto, *Government Spending in Indonesia 2005-2013 from Islamic Economic Perspective*, 45–47.

¹⁰ Tamba dkk., *The Concept and Philosophy of Fiscal Policy in Modern and Islamic Historical Perspectives*, 8–10.

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

upaya negara untuk menjamin keterjangkauan harga serta mencegah terjadinya kesenjangan akses terhadap barang kebutuhan pokok.¹¹ Dengan demikian, intervensi negara bersifat melindungi kepentingan publik, bukan membatasi kebebasan ekonomi secara sewenang-wenang.

Dalam perspektif ekonomi mikro Islam, kebijakan pengendalian atau penetapan harga oleh pemerintah juga memiliki dasar konseptual yang jelas. Kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan mekanisme permintaan dan penawaran, tetapi untuk menghindari ketidakadilan yang muncul akibat ketidakseimbangan pasar. Negara diposisikan sebagai penjaga keadilan ekonomi yang bertugas memastikan bahwa harga terbentuk secara wajar dan tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi salah satu pihak.¹² Pandangan ini menegaskan bahwa pasar dalam Islam beroperasi dalam kerangka nilai etika dan tujuan sosial, bukan sebagai ruang bebas tanpa batas.

Selain itu, literatur menekankan bahwa intervensi negara harus dilakukan secara proporsional dan berorientasi pada kepentingan umum. Intervensi yang terlalu besar berpotensi menciptakan distorsi baru dan melemahkan fungsi pasar, sementara minimnya intervensi dapat memperbesar ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Islam menempatkan negara pada posisi strategis sebagai regulator sekaligus fasilitator pasar. Negara bertanggung jawab menciptakan iklim pasar yang adil, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi kelompok rentan dari dampak negatif mekanisme pasar yang tidak terkendali.¹³

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa peran negara dan intervensi pasar dalam perspektif Islam memiliki landasan normatif dan konseptual yang kokoh. Intervensi pasar dipandang sebagai kebijakan yang sah selama diarahkan untuk menjaga keadilan ekonomi, melindungi kepentingan masyarakat luas, dan mendukung pencapaian kesejahteraan sosial. Kerangka pemahaman ini menjadi dasar penting untuk menganalisis subtema selanjutnya,

¹¹ Santi Merlinda, *Peranan Pemerintah melalui Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM di Indonesia)*, 20 (2022): 15–18.

¹² Suhardina dan Indah Khairunnisa Sihotang, *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Menetapkan Harga Bahan Pokok Pada Perspektif Islam*, t.t., 4–6.

¹³ Andriansyah dan Anto, *Government Spending in Indonesia 2005-2013 from Islamic Economic Perspective*, 48–50.

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

terutama yang berkaitan dengan keadilan fiskal dan distribusi kesejahteraan dalam kebijakan subsidi.

3. Subsidi, Keadilan Fiskal, dan Distribusi Kesejahteraan

Telaah terhadap berbagai sumber pustaka memperlihatkan bahwa kebijakan subsidi dalam ekonomi Islam memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip keadilan fiskal dan tujuan pemerataan kesejahteraan. Subsidi dipahami sebagai instrumen kebijakan yang digunakan negara untuk mereduksi ketimpangan distribusi sumber daya yang timbul akibat perbedaan kapasitas ekonomi antar kelompok masyarakat. Dalam perspektif ini, keadilan fiskal tidak dimaknai sebagai perlakuan seragam, melainkan sebagai kebijakan yang secara sadar berpihak kepada kelompok masyarakat dengan akses ekonomi yang terbatas.¹⁴ Melalui subsidi, negara berupaya memastikan agar manfaat pembangunan ekonomi tidak terakumulasi pada kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan secara lebih luas.

Lebih lanjut, literatur menegaskan bahwa konsep keadilan fiskal dalam ekonomi Islam menuntut adanya mekanisme redistribusi yang adil dan terarah. Subsidi tidak diposisikan sebagai bantuan temporer semata, melainkan sebagai instrumen korektif untuk menyeimbangkan struktur sosial dan ekonomi yang mengalami ketimpangan. Ketika kebijakan subsidi disusun tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan, subsidi justru berpotensi memperdalam kesenjangan dan mengurangi efektivitas distribusi kesejahteraan. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya keselarasan antara tujuan kebijakan subsidi, ketepatan kelompok sasaran, dan dampak nyata kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Dalam kerangka pengelolaan keuangan publik, subsidi ditempatkan sebagai bagian integral dari belanja negara yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Kajian literatur menunjukkan bahwa belanja negara dalam perspektif Islam

¹⁴ Muhammad Daffa Adhie Prasetya, Farid Maulana Saragih, *Membangun Keadilan Fiskal: Analisis Sederhana Tentang Subsidi dan Redistribusi*, Zenodo, 1 Juni 2025, 2–3, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15570783>.

¹⁵ Muhammad Daffa Adhie Prasetya, Farid Maulana Saragih, *Membangun Keadilan Fiskal: Analisis Sederhana Tentang Subsidi dan Redistribusi*, Zenodo, 1 Juni 2025, 4–5, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15570783>.

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta menjaga keseimbangan sosial. Subsidi, sebagai salah satu komponen belanja negara, memiliki peran strategis dalam mendorong distribusi kesejahteraan apabila dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.¹⁶ Dengan demikian, subsidi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana negara untuk mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Distribusi kesejahteraan dalam ekonomi Islam juga berkaitan erat dengan pencapaian nilai *falah* dan *maslahah*. Kesejahteraan tidak diukur semata-mata dari peningkatan pendapatan, tetapi dari sejauh mana kebijakan negara mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, mengurangi kesenjangan sosial, serta menjaga martabat manusia. Dalam kerangka tersebut, subsidi dipandang sebagai kebijakan yang memiliki legitimasi normatif apabila mampu berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan tersebut.¹⁷ Subsidi yang tidak diarahkan pada kesejahteraan substantif berpotensi kehilangan makna dan justifikasi dalam perspektif ekonomi Islam.

Di sisi lain, literatur juga menyoroti bahwa persoalan utama dalam pelaksanaan kebijakan subsidi sering kali terletak pada aspek distribusi. Ketidaktepatan sasaran serta lemahnya mekanisme pengawasan dapat menghambat tercapainya keadilan fiskal yang diharapkan. Oleh karena itu, subsidi dalam perspektif ekonomi Islam menuntut integrasi yang kuat antara kebijakan fiskal, sistem distribusi yang adil, dan orientasi kesejahteraan. Pemahaman ini menegaskan bahwa keberhasilan subsidi tidak semata-mata ditentukan oleh besaran anggaran yang dialokasikan, melainkan oleh kemampuan kebijakan tersebut dalam mendorong distribusi kesejahteraan secara adil dan berkelanjutan.¹⁸

4. Efektivitas Subsidi dalam Menjaga Kesejahteraan dan Daya Beli Masyarakat

¹⁶ Andriansyah dan Anto, *Government Spending in Indonesia 2005-2013 from Islamic Economic Perspective*, 51–52.

¹⁷ Andriansyah dan Anto, *Government Spending in Indonesia 2005-2013 from Islamic Economic Perspective*, 53–54.

¹⁸ Farid Maulana Saragih¹, *Membangun Keadilan Fiskal*, 6–7.

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

Berdasarkan penelaahan literatur, efektivitas kebijakan subsidi dalam perspektif ekonomi Islam dipahami melalui kemampuannya menjaga daya beli masyarakat sekaligus melindungi kesejahteraan kelompok yang rentan secara ekonomi. Subsidi diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang berfungsi meredam dampak fluktuasi harga dan tekanan ekonomi terhadap konsumsi rumah tangga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kerangka ini, kebijakan stabilisasi harga melalui subsidi dipandang sebagai bentuk kehadiran negara untuk memastikan keterjangkauan barang kebutuhan pokok agar kemampuan konsumsi masyarakat tetap terjaga.¹⁹

Literatur juga menegaskan bahwa keberhasilan subsidi tidak semata ditentukan oleh keberadaan kebijakan tersebut, tetapi sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerimanya. Subsidi yang difokuskan pada komoditas strategis, seperti energi dan kebutuhan dasar, dinilai memiliki peran penting dalam menjaga daya beli serta menekan beban pengeluaran rumah tangga. Sebaliknya, subsidi yang tidak tepat sasaran berpotensi mengurangi manfaat kebijakan dan menimbulkan inefisiensi dalam pengelolaan fiskal. Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi Islam, efektivitas subsidi mensyaratkan keselarasan antara tujuan kebijakan, mekanisme distribusi, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat penerima.²⁰

Dari sudut pandang kesejahteraan, literatur menunjukkan bahwa subsidi turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dengan menekan potensi gejolak ekonomi yang dapat muncul akibat kenaikan harga. Stabilitas harga yang dihasilkan melalui kebijakan subsidi memungkinkan masyarakat mempertahankan pola konsumsi yang layak, sehingga kesejahteraan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pendapatan, tetapi juga sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan

¹⁹ Maisyah Hawanda dkk., "Islamic Economic Approach to Strengthening Public Purchasing Power through Price Stabilisation Policy," *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 11, no. 2 (2024): 10–11, <https://doi.org/10.21107/dinar.v11i2.25930>.

²⁰ Reni Helvira dkk., "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 45–46, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1775>.

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

tujuan ekonomi Islam yang menempatkan perlindungan terhadap kebutuhan dasar sebagai bagian dari pencapaian *maslahah*.²¹

Namun demikian, kajian literatur juga mengungkap bahwa tingkat efektivitas subsidi sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan dan mekanisme pelaksanaannya. Subsidi yang bersifat umum dan tidak terarah berisiko dinikmati oleh kelompok yang tidak membutuhkan, sehingga mengurangi dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya pengelolaan subsidi yang adil, terukur, dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan. Perspektif ini menegaskan bahwa efektivitas subsidi tidak hanya diukur dari besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.²²

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa subsidi memiliki posisi strategis dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat apabila dirancang dan diimplementasikan secara tepat. Dalam perspektif ekonomi Islam, efektivitas subsidi tidak hanya dilihat dari kemampuannya menstabilkan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi dari kontribusinya dalam mendukung kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemahaman ini menjadi landasan untuk melanjutkan pembahasan pada subtema berikutnya yang menitikberatkan pada aspek pengawasan dan penerapan prinsip *hisbah* dalam kebijakan subsidi.

5. Pengawasan Subsidi dan Prinsip Hisbah dalam Ekonomi Islam

Hasil penelaahan pustaka menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan subsidi dalam perspektif ekonomi Islam sangat bergantung pada keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif. Subsidi yang dirancang untuk melindungi kesejahteraan masyarakat tidak akan memberikan dampak optimal apabila tidak

²¹ Helvira dkk., “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” 47.

²² Helvira dkk., “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” 48.

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

disertai pengawasan yang memadai. Dalam ekonomi Islam, pengawasan tidak hanya dipahami sebagai fungsi administratif negara, tetapi juga sebagai tanggung jawab normatif untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam aktivitas ekonomi. Prinsip *hisbah* menjadi landasan utama yang memberikan legitimasi moral dan institusional bagi negara dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan ekonomi, termasuk subsidi.²³

Literatur menegaskan bahwa *hisbah* berfungsi sebagai mekanisme pengawasan pasar yang bertujuan menjaga keteraturan dan melindungi kepentingan publik. Prinsip ini menempatkan otoritas negara sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung sesuai dengan nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Dalam konteks penyaluran subsidi, *hisbah* berperan untuk memastikan ketepatan sasaran, mencegah penyalahgunaan, serta menghindarkan terjadinya distorsi pasar yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha kecil.²⁴ Dengan demikian, pengawasan subsidi dalam ekonomi Islam memiliki dimensi etis yang kuat dan tidak terbatas pada aspek teknis kebijakan semata.

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan berpotensi membuka ruang terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, seperti penimbunan barang bersubsidi, penyalahgunaan distribusi, atau manipulasi harga. Kondisi tersebut tidak hanya menurunkan efektivitas subsidi, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan dan terintegrasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari kebijakan subsidi. Pengawasan yang efektif dipandang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasar sekaligus melindungi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama kebijakan subsidi.²⁵

²³ Farah Saima dan Faisal Fauzan, "The Theory Of Al-Misbah On Subsidized Gas Distribution: A Case Study of Banda Raya Sub-District, Banda Aceh, Indonesia," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2025): 2–4, <https://doi.org/10.22373/jurista.v9i1.252>.

²⁴ Farah Saima dan Faisal Fauzan, "The Theory Of Al-Misbah On Subsidized Gas Distribution: A Case Study of Banda Raya Sub-District, Banda Aceh, Indonesia," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2025): 5–6, <https://doi.org/10.22373/jurista.v9i1.252>.

²⁵ Aniq Fadillah dkk., "Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam," *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 3 (2025): 12–14, <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1666>.

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

Selain berfungsi menjaga ketepatan distribusi, pengawasan dalam perspektif ekonomi Islam juga berkaitan erat dengan perlindungan konsumen dan stabilitas harga. Literatur menunjukkan bahwa negara memiliki peran strategis dalam mengawasi pergerakan harga barang kebutuhan pokok agar tetap berada pada tingkat yang wajar dan terjangkau. Dalam konteks ini, prinsip *hisbah* memberikan dasar normatif bagi negara untuk melakukan pengawasan terhadap harga dan distribusi, sehingga mekanisme pasar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan berlebihan.²⁶ Pengawasan yang dijalankan secara konsisten membantu memastikan bahwa subsidi benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa pengawasan subsidi dalam perspektif ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip *hisbah*. Pengawasan dipahami sebagai instrumen penting untuk menjaga keadilan distribusi, mencegah penyimpangan kebijakan, serta memastikan bahwa subsidi dilaksanakan sesuai dengan tujuan kemaslahatan. Dengan kerangka tersebut, evaluasi terhadap subsidi tidak hanya difokuskan pada desain kebijakan, tetapi juga pada kualitas dan konsistensi pengawasan yang menyertainya. Pemahaman ini menjadi dasar penting untuk melanjutkan pembahasan pada subtema berikutnya yang mengkaji dampak kebijakan subsidi terhadap kesejahteraan rakyat secara lebih luas.

6. Kebijakan Subsidi BBM dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Rakyat

Penelaahan literatur menunjukkan bahwa kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) memiliki posisi strategis dalam perekonomian karena pengaruhnya yang luas terhadap stabilitas harga, biaya produksi, dan daya beli masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, subsidi BBM dipahami sebagai instrumen kebijakan publik yang diarahkan untuk menjaga akses masyarakat terhadap energi dengan harga yang terjangkau, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah. BBM tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi,

²⁶ Aniq Fadillah dkk., "Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam," 15–16.

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

tetapi sebagai faktor pendukung utama aktivitas sosial dan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.²⁷

Literatur juga mengungkap bahwa subsidi BBM berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan rakyat melalui pengaruhnya terhadap struktur biaya hidup. Kenaikan harga BBM berpotensi memicu peningkatan harga barang dan jasa lainnya, sehingga dapat menekan daya beli masyarakat. Dalam kerangka ini, subsidi BBM dipahami sebagai mekanisme negara untuk meredam tekanan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Perspektif ekonomi Islam memandang kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan negara agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak.²⁸

Di sisi lain, kajian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi BBM menghadapi tantangan serius dalam aspek keadilan dan ketepatan sasaran. Subsidi yang bersifat umum cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan tingkat konsumsi energi yang tinggi, sementara kelompok miskin memperoleh manfaat yang relatif lebih kecil. Kondisi ini menimbulkan persoalan keadilan distributif yang menjadi perhatian penting dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, literatur menekankan perlunya perancangan subsidi BBM yang lebih selektif dan berorientasi pada kemaslahatan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.²⁹

Dalam perspektif hukum dan ekonomi Islam, kebijakan pembatasan atau pengalihan subsidi BBM dapat dibenarkan sepanjang bertujuan menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembatasan subsidi tidak dipahami sebagai pengurangan tanggung jawab negara, melainkan sebagai penyesuaian kebijakan agar subsidi menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan demikian, penilaian terhadap subsidi BBM tidak semata-mata didasarkan pada besaran anggaran, tetapi pada dampaknya terhadap pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.³⁰

²⁷ Siti Salasatu Sa'diyah dkk., "Kebijakan Subsidi BBM," *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 3–5, <https://doi.org/10.63822/bbs6f165>.

²⁸ Siti Salasatu Sa'diyah dkk., "Kebijakan Subsidi BBM," 6–8.

²⁹ Siti Salasatu Sa'diyah dkk., "Kebijakan Subsidi BBM," 9–10.

³⁰ Nur Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatasan Subsidi BBM Jenis Premium" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012), 12–14.

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

Lebih lanjut, literatur menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan subsidi BBM sangat ditentukan oleh desain kebijakan dan mekanisme implementasinya. Subsidi yang tidak disertai dengan pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan penyimpangan, seperti penimbunan dan penyalahgunaan distribusi, yang justru merugikan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan subsidi BBM, mekanisme pengawasan, dan orientasi kesejahteraan. Pendekatan ini menegaskan bahwa subsidi BBM harus diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang berkeadilan, efisien, dan selaras dengan tujuan *maslahah*.³¹

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa subsidi BBM dalam perspektif ekonomi Islam memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan rakyat, namun sekaligus menuntut pengelolaan yang adil dan tepat sasaran. Kebijakan subsidi BBM yang tidak memperhatikan prinsip keadilan distributif berpotensi menimbulkan ketimpangan dan menurunkan efektivitas kebijakan. Kerangka pemahaman ini menjadi dasar untuk melanjutkan pembahasan pada subtema berikutnya yang mengkaji hubungan antara subsidi, harga pangan, dan stabilitas sosial-ekonomi.

7. Subsidi, Harga Pangan, dan Stabilitas Sosial-Ekonomi

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa subsidi pada sektor pangan memiliki peranan yang krusial dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kestabilan harga pangan dipandang sebagai prasyarat utama bagi terciptanya ketertiban sosial dan keamanan ekonomi. Subsidi pangan ditempatkan sebagai instrumen kebijakan negara untuk menjamin keterjangkauan harga bahan pokok, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga fluktuasi harga tidak berkembang menjadi kerentanan sosial yang lebih luas.³²

Literatur juga menegaskan bahwa lonjakan harga pangan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan tekanan sosial serta memperbesar

³¹ Siti Salasatu Sa'diyah dkk., "Kebijakan Subsidi BBM," 11–12.

³² Aniq Fadillah dkk., "Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam," 324–27.

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

kesenjangan ekonomi. Dalam kondisi demikian, subsidi berfungsi sebagai mekanisme penyangga yang menahan gejolak harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Perspektif ekonomi Islam memandang kebijakan ini sebagai wujud tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif mekanisme pasar yang tidak selalu berpihak pada kepentingan publik. Dengan demikian, subsidi pangan tidak hanya dipahami sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial.³³

Kajian selanjutnya menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan sangat bergantung pada peran negara dalam mengawasi distribusi serta mengendalikan praktik pasar yang menyimpang. Tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan subsidi berisiko tidak efektif dan bahkan dapat memunculkan distorsi baru, seperti penimbunan atau spekulasi harga. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya keterpaduan antara kebijakan subsidi, mekanisme pengawasan pasar, dan perlindungan konsumen agar stabilitas sosial-ekonomi dapat terjaga secara berkelanjutan.³⁴

Dalam kerangka kesejahteraan, stabilitas harga pangan dipandang sebagai fondasi penting bagi terciptanya rasa aman ekonomi di tingkat rumah tangga. Subsidi yang mampu menjaga harga pangan pada tingkat yang wajar berkontribusi pada penurunan risiko kerawanan pangan serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Pandangan ini selaras dengan tujuan ekonomi Islam yang menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai bagian integral dari pencapaian *maslahah* dan *falah*.³⁵

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa subsidi pangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi melalui pengendalian harga dan perlindungan daya beli masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan kebijakan subsidi pangan tidak hanya diukur dari tercapainya stabilitas harga dalam jangka pendek, tetapi dari kemampuannya mencegah gejolak sosial dan mendukung terwujudnya kesejahteraan yang

³³ Aniq Fadillah dkk., "Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam," 328–31.

³⁴ Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatasan Subsidi BBM Jenis Premium," 45–47.

³⁵ Aniq Fadillah dkk., "Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam," 332–34.

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

berkeadilan. Subtema ini melengkapi keseluruhan pembahasan dengan menegaskan bahwa kebijakan subsidi, khususnya di sektor pangan, merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial masyarakat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pemerintah dalam perspektif ekonomi mikro Islam memiliki landasan normatif dan konseptual yang kuat sebagai instrumen untuk menjaga keadilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Subsidi dipahami bukan sekadar sebagai kebijakan fiskal yang bersifat teknis, melainkan sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, melindungi kelompok rentan, serta mengoreksi ketidaksempurnaan mekanisme pasar. Dalam kerangka ekonomi Islam, legitimasi subsidi terletak pada orientasinya terhadap *maslahah* dan *falah*, yaitu kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hasil sintesis literatur juga menegaskan bahwa efektivitas subsidi sangat ditentukan oleh desain kebijakan, ketepatan sasaran, serta kualitas pengawasan yang menyertainya. Subsidi yang tidak dikelola secara adil dan akuntabel berpotensi menimbulkan ketimpangan baru dan mengurangi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi mikro Islam menempatkan subsidi sebagai instrumen kebijakan yang harus terintegrasi dengan prinsip keadilan fiskal, peran negara yang proporsional, serta mekanisme pengawasan berbasis nilai etis Islam. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kerangka konseptual subsidi sebagai kebijakan publik yang tidak hanya dinilai dari efisiensi ekonomi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan sosial dan moral Islam.

2. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, lembaga pemerintah disarankan untuk merancang kebijakan subsidi yang lebih selektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dengan memperkuat mekanisme pengawasan agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan distorsi pasar. Selain itu, integrasi nilai-nilai ekonomi Islam, khususnya prinsip *maslahah*, *hisbah*, dan keadilan distributif, perlu dijadikan

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

acuan dalam evaluasi dan penyesuaian kebijakan subsidi. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan menggabungkan analisis konseptual dan pendekatan empiris, baik melalui studi kasus kebijakan subsidi tertentu maupun dengan memasukkan variabel sosial-ekonomi yang lebih beragam, sehingga pemahaman mengenai dampak subsidi terhadap kesejahteraan rakyat dapat diperoleh secara lebih komprehensif.

**ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF
MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, Yuli, dan M Bekti Hendrie Anto. *Government Spending in Indonesia 2005-2013 from Islamic Economic Perspective*. 6 (2016).
- Aniq Fadillah, Siti Anisah Martia Putri, dan Hanna Izmi Himayatillah. "Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam." *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 3 (2025): 324–44. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1666>.
- Batubara, Damri. "Pandangan Islam Terhadap Subsidi." *At-Tijaroh* 2, no. 2 (2016): 142–54.
- Farah Saima dan Faisal Fauzan. "THE THEORY OF AL-MISBAH ON SUBSIDIZED GAS DISTRIBUTION: A Case Study of Banda Raya Sub-District, Banda Aceh, Indonesia." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2025): 189–208. <https://doi.org/10.22373/jurista.v9i1.252>.
- Farid Maulana Saragih¹, Muhammad Daffa Adhie Prasetya². *Membangun Keadilan Fiskal: Analisis Sederhana Tentang Subsidi dan Redistribusi*. Zenodo, 1 Juni 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15570783>.
- Hawanda, Maisyah, Atika Atika, dan Khairina Tambunan. "Islamic Economic Approach to Strengthening Public Purchasing Power through Price Stabilisation Policy." *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 11, no. 2 (2024): 151–63. <https://doi.org/10.21107/dinar.v11i2.25930>.
- Helvira, Reni, Syamratun Nurjannah, dan Ari Widiati. "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 43–54. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1775>.
- Hidayat, Faqih Nur, dan Moh. Mas'udi. *PANDANGAN ISLAM TERHADAP HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI INDONESIA (PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH) ISLAMIC VIEWS ON THE PRICE OF FUEL OIL IN INDONESIA (PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH)*. t.t., 20.
- Laila, Ahrina, Adila Misbahussururi, dan Maya Panorama. *Government Policies In Islamic Microeconomics Kebijakan Pemerintah Dalam Ekonomi Mikro Islam*. t.t.
- Merlinda, Santi. *Peranan Pemerintah melalui Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM di Indonesia)*. 20 (2022).

**ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF
MIKRO EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Riza Sofiana Dewi 1, Sova Sevilia 2, Kotimah 3

Mujib, Abdul, Ahmad Bahiej, dan Sh M Hum. *MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*. t.t.

Munthe, M Taufiqurrohman, Mhd Asaad, dan Rasidin Karo Karo Sitepu. *Dampak Kebijakan Harga Acuan Pembelian Pemerintah dan Harga Input terhadap Produksi Jagung di Indonesia*. 21, no. 2 (2025).

Oktafia, Renny, Ririt Iriani, dan Reinanda Aprilia Putri Rochimin. "The Concept of Fiscal Policy: An Islamic Economic Perspective." *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS* 5, no. 2 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.35896/jse.v5i2.573>.

Rahmawati, Nur. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatasan Subsidi BBM Jenis Premium." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

Siti Salasatu Sa'diyah, Eli Apud Saepudin², Resma Cahya, Siti Lita Rosita, dan Nova Qurrota Ayun. "Kebijakan Subsidi BBM." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 286–93. <https://doi.org/10.63822/bbs6f165>.

Suhardina, dan Indah Khairunnisa Sihotang. *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Menetapkan Harga Bahan Pokok Pada Perspektif Islam*. t.t.

Tamba, Dheddy Abdi, Yadi Janwari, dan Muhammad Hasanuddin. *The Concept and Philosophy of Fiscal Policy in Modern and Islamic Historical Perspectives*. 2, no. 1 (t.t.).